

BAB V

KESIMPULAN

Mesir merupakan negara dengan serangkaian sejarah panjang yang membanggunya. Pergolakan yang terjadi di dalam negeri telah menjadi bagian dari sejarah yang mengubah sejumlah tatanan pemerintahan Mesir. Berbagai pihak juga turut andil dalam perjalanan Mesir ini, salah satunya adalah kelompok militer. Militer Mesir, merupakan salah satu badan militer yang terkuat di kawasan Timur Tengah. Kehadiran kelompok militer membawa suatu keunikan tersendiri dalam pemerintahan Mesir. Keunikan ini disebabkan oleh kemampuan militer untuk bertahan dan menguasai pemerintahan Mesir selama beberapa periode kepemimpinan. Salah satu momentum penting yang mengawali kepemimpinan militer di Mesir adalah pada saat terjadinya kudeta terhadap pemerintahan Raja Farouk pada Juli 1952. Kudeta ini dilakukan oleh para perwira militer yang tergabung dalam *The Free Officers* atau Organisasi Perwira Bebas dibawah pimpinan Gamal Abdul-Nasser. Militer Mesir memegang peranan penting dalam situasi perpolitikan saat itu. Tugas-tugas militer juga bukan hanya sebagai aparaturnegara dalam menjaga keamanan, tapi juga berperan dalam berbagai kebijakan politik. Para perwira tersebut kemudian membentuk Dewan Komando Revolusi (RCC), yang pada akhirnya mengubah bentuk negara Mesir (Widyarsa, 2012: 275).

Sistem Pemerintahan Mesir adalah republik dan presiden sebagai kepala Negara. Berdasarkan Piagam Nasional 1962 dan Konstitusi 1971, Mesir merupakan sebuah Negara sosialis demokratis yang disebut Republik Arab Mesir. Dalam Piagam Nasional 1962 dikatakan bahwa tujuan Republik Mesir adalah kemerdekaan, sosialisme, dan kesatuan Arab, sedangkan konstitusi menetapkan struktur resmi dalam pemerintahan Mesir yakni, presiden, cabinet, badan legislative, dan pengadilan.

Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan

eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri, tetapi dalam praktiknya, kekuasaan terpusat pada Presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai.

Pemerintahan Hosni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun telah menerapkan pola-pola dan praktek otoriter dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya di Mesir. Mubarak menguasai setiap sendi kehidupan politik di Mesir melalui suasana yang penuh dengan manipulasi, tindakan represif, dan intimidasi melalui instrument-instrument politik dan hukum yang mendukungnya. Sementara dalam aspek ekonomi, rezim penguasa Mubarak yang menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi, mendorong negara kedalam ketidakefisienan ekonomi, ketimpangan pelaku ekonomi, serta memunculkan budaya korupsi yang tentunya berdampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat. Hidup dalam pengalaman buruk politik otoriter mendorong rakyat bersatu menentang dan melengserkan Mubarak dalam bentuk revolusi pada tanggal 25 Januari 2011.

Mesir memasuki masa transisi politik demokrasi pasca lengsernya Mubarak dari kekuasaan Mesir. Angkatan Bersenjata yang memegang kekuasaan sementara mengadakan pemilihan umum untuk pertama kalinya di Mesir. Hasil pemilu tersebut disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Mesir bahwa Mursi meraih 51,73% suara, mengalahkan mantan perdana menteri Ahmed Shafiq, Mursi meraih 13.230.131 suara sementara Shafiq mendapat 12.347.380 dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 51,8% dari lebih 50 juta warga Mesir yang memiliki hak untuk memberikan suara.

Terpilih Muhammad Mursi sebagai Presiden periode selanjutnya menjadi harapan baru bagi rakyat Mesir. Tetapi proses perubahan yang begitu cepat. Pada Kamis 22 November 2012, Mursi mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa Mursi mempunyai otoritas tertinggi, final, dan tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun. Dekrit tersebut memberikan perlindungan hukum bagi parlemen, perlindungan kepada para politisi yang duduk di majelis tinggi

yang didominasi oleh golongan Ikhwanul Muslimin. Tidak disertai dengan kesiapan yang matang oleh para politisi Mesir seperti Ikhwanul Muslimin, hal tersebut menimbulkan kemarahan kubu oposisi Front Nasional yang di pimpin Mohammed El Baradei dan rakyat. Hal ini menyebabkan puncak reaksi militer Mesir yang berakibat penggulingan Mursi dari kursi presiden. Pada akhirnya Mursi lengser dari kursi Kepresidenan pada tanggal 3 Juli 2013 oleh tuntutan rakyat yang didukung oleh militer dan dukungan dari Amerika Serikat.

Kondisi ini akhirnya membawa Mesir kembali kedalam kepemimpinan militer yang cenderung menerapkan kebijakan serupa dengan rezim otoriter Mubarak.